

Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (Taman Pesisir)
Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang
Yusmanto¹, Sutrisno Anggoro², Tukiman Taruna³

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan UNDIP

² Dosen Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana dan Magister Manajemen Sumberdaya Perairan UNDIP

³ Dosen Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana UNDIP dan Staf UNICEF

ABSTRACT

Marine conservation area in the world only covers less than half a percent of the world ocean that reaches seventy percent of the earth's surface, and only a third are well managed. Marine conservation management plan at local government is for the habitat and ecological processes and protection of resources values so that the fisheries, tourism, research, and education activity can be implemented in a sustainable manner. This study aimed to determine the effectiveness of KKLD Ujungnegoro - Roban Batang management. This research is descriptive qualitative with in-depth interview techniques to area managers, stakeholders and community in the conservation area with the help of scorecard. This scorecard was developed by the World Bank and WWF for evaluating marine protected areas which useful for the management of conservation area. Overall management of KKLD Ujungnegoro - Roban Batang achieved score of 111 points out of a total of 188 points, or about 59.04%. Assessment of the best criteria obtained from terms of planning but from achievement criteria obtained the lowest score. The lack of local government commitment to KKLD sustainability are because of the limited ability of the local government still a source of management problems. Community acceptance of the KKLD Ujungnegoro - Roban Batang existence are pretty good, whether they that have a background as fishermen as well as tourism activities supporter in KKLD Ujungnegoro - Roban Batang. The benefits of marine protected areas they feel through increasing of community income and welfare.

Keywords: *management, conservation, marine, coastal park*

1. PENGANTAR

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menjelaskan bahwa konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. Selanjutnya dalam aspek pengelolaan disebutkan bahwa asas pengelolaan perikanan adalah manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan berkelanjutan, dimana pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dijelaskan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Luas laut dunia yang mencakup 70% bagian Bumi, namun luasan daerah perairan laut yang dilindungi sangat kecil. Saat ini seluruh wilayah kawasan konservasi laut hanya meliputi kurang dari setengah persen luas wilayah laut, dan kurang dari sepertiganya yang berstatus sangat dilindungi dan 71% tidak ada pengelolaan yang aktif (Robert C.M & J.P. Hawkins, 2000).

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampai September 2009, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencadangkan Taman Nasional Perairan seluas 3.521.130,01 ha, memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pencadangan 35 kawasan konservasi perairan laut seluas 4.589.006,01 ha. Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menetapkan 8 (delapan) kawasan konservasi yang telah diserahterimakan dari Departemen Kehutanan seluas 723.984 ha, dan kawasan konservasi laut inisiasi Kementerian Kehutanan seluas 4.694.947,55 ha sehingga sampai akhir 2009 total luas kawasan konservasi laut Indonesia mencapai 13.529.067,66 ha.

Menurut Selig and Bruno (2010) segala kegiatan manusia akhirnya akan mempengaruhi struktur bangunan terumbu karang. Secara ekologis, sosial dan nilai ekonomi terumbu karang mendasari betapa pentingnya konservasi terumbu karang secara internasional. Keberhasilan kawasan konservasi laut dalam mengembalikan populasi ikan juga merupakan dampak secara tidak langsung keberadaan terumbu karang dalam upaya mengurangi ancaman overfishing, yang selama ini disebabkan oleh rusaknya terumbu karang. Meskipun demikian, secara umum tingkat efektivitas keberadaan kawasan konservasi laut dalam meningkatkan penutupan terumbu karang juga harus masih dikaji lebih lanjut pada tiap daerah.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kawasan konservasi laut membutuhkan seluruh perhatian tidak hanya pada aspek biologi dan oseanografi yang berpengaruh terhadap kawasan, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial,

ekonomi dan kelembagaan yang sangat berpengaruh terhadap dampak keberlangsungan kawasan konservasi laut (Charles et al, 2009).

Salah satu kawasan konservasi laut daerah (KKLD) adalah KKLD Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang yang ditetapkan melalui SK Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tanggal 15 Desember 2005 dengan luas mencapai 6.893,75 ha dengan panjang bentang pantai sejauh 7 km. Empat desa yang termasuk dalam kawasan KKLD Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang meliputi Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng dan Desa Kedung Segog Kecamatan Roban. Pendekatan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro – Roban sebagai KKLD adalah dikarenakan kawasan ini melindungi 3 obyek penting dalam menjaga ekosistem, yaitu : (1) kawasan Karang Kretek yang memiliki peran penting melindungi potensi sumberdaya ikan bagi nelayan tradisional; (2) kawasan situ Syekh Maulana Magribi yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Batang; dan (3) kawasan wisata pantai Ujungnegoro yang memberikan andil pada perkembangan industri pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Batang (DKP Kabupaten Batang, 2009).

Permasalahan umum yang terjadi di sepanjang pantai utara Jawa termasuk Jawa Tengah adalah abrasi, akresi, overfishing, semakin rusaknya terumbu karang dan hutan bakau, pencemaran dan alih fungsi lahan di luar peruntukannya. Perubahan fungsi lahan yang tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem akan memberikan tekanan bahkan rusaknya habitat vital di kawasan pesisir. Pencemaran yang berasal dari kegiatan budidaya ikan tidak hanya masalah lingkungan di kawasan pesisir saja. Banyak ahli melaporkan, mulai dari lokal sampai skala global, bahwa telah terjadi tingkat mengkhawatirkan kandungan mercury, dioxin dan kontaminan dalam ikan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Kontaminan seperti PCB, dioxin dan mercury telah ditemukan pada ikan laut seperti tuna, blue fish, striped bass (Osher, 2006).

Permasalahan dan ancaman dalam pengelolaan kawasan konservasi laut yang terjadi akan berdampak secara signifikan dan mampu menyebabkan degradasi sumberdaya alam, yang harus ditangani dengan baik secara lintas sektor melalui kebijakan pengelolaan yang mampu memberikan dampak keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan. Peran pemerintah daerah pada era otonomi daerah ini sangat strategis dalam pengelolaan kawasan konservasi laut daerah yang mampu menjadikan perairan laut sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat yang berkelanjutan.

2. METODOLOGI

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk meneliti suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2005). Tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran ilustrasi dan/atau ringkasan yang dapat membantu pembaca memahami jenis variabel dan keterkaitannya (Tashakkori, dkk. 2010).

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini secara kualitatif, mengenai proses yang mendasari munculnya suatu kebijakan. Menurut Iskandar (2009), pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pendekatan ini cenderung lebih mementingkan proses dibandingkan hasil akhir pada suatu kejadian yang bersifat praktis. Data yang dihasilkan merupakan data deskriptif yang berasal dari hasil tulisan atau wawancara dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2012. Konsep yang diajukan dalam penelitian ini adalah konsep pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu secara partisipatif dengan melibatkan seluruh kelembagaan dan pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola dan para pemangku kepentingan dan data sekunder meliputi kondisi terakhir KKLD diperoleh dari hasil kajian terakhir. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan score card yang diadaptasi dan dikembangkan oleh World Bank dan WWF untuk kawasan konservasi daratan dan kawasan lain (Stolton S. et al, (2003), Hocking M. Et al (2000), Mangubhai S, (2003)) dalam Staub and Hatzios (2004).

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Kerangka Regulasi KKLD / Taman Pesisir Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang

Kerangka regulasi terkait Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) / Taman Pesisir Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

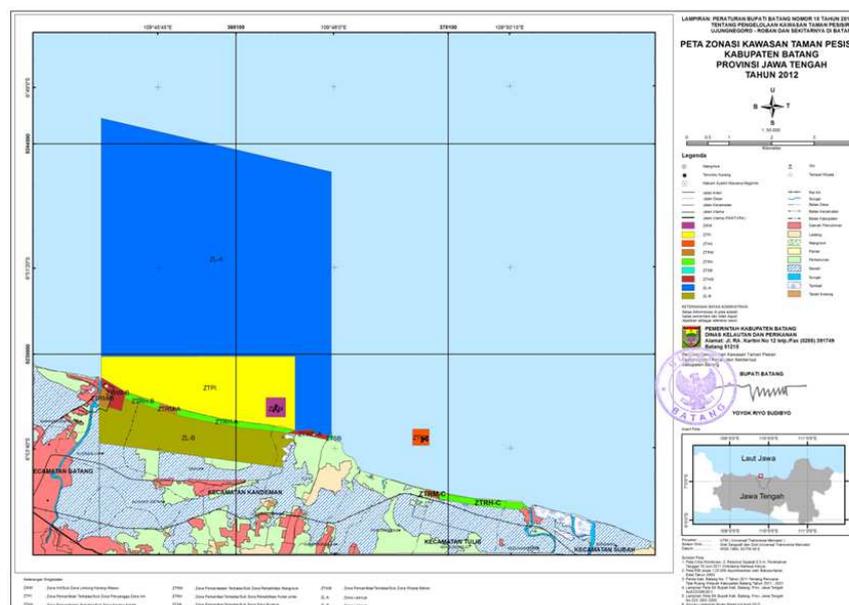
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
7. Keputusan Bupati Batang nomor : 523/283/2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang.
8. Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor : 523/283/2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang
9. SK Bupati Nomor 523/194/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro – Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang
10. Peraturan Bupati batang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (KKLD)/Taman Pesisir Ujungnegoro Kabupaten Batang.
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)/ Taman Pesisir Ujungnegoro Kabupaten Batang.
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro – Roban dan Sekitarnya Di Kabupaten Batang.

3.2 Gambaran Umum KKLD Pantai Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang

Penyusun utama kawasan konservasi ini adalah terumbu karang yang berupa karang Kretek dan Maeso, dan tanaman bakau yang ada di sepanjang pantai mulai dari pantai Sigandu bagian barat dan muara Sungai Boyo di bagian timur. Sesuai Keputusan Bupati Keputusan Bupati Batang Nomor : 523/283/2005 dan dirubah menjadi Nomor 523/306/2011 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang, jenis flora yang dilindungi meliputi Cemara laut, Nyamplung, Api-api (*Avicenia sp*), Ketapang dan Bakau, dimana semua adalah jenis tanaman bakau (mangrove). Hasil kajian di lapangan menunjukkan kerapatan tertinggi di daerah Ujungnegoro yang mencapai 2.433 individu/ha dan terendah di Sigandu dengan kerapatan 1.700 individu/ha (DKP, 2012). Namun demikian, jenis flora yang dilindungi di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang tidak termasuk dalam daftar flora yang dilindungi sesuai CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Appendices I, II and III).

Kondisi terumbu karang baik di Karang Kretek maupun Karang Maeso menerima tekanan ekologis yang sangat kuat berupa tingginya sedimentasi yang berasal dari Sungai Boyo, Sungai Sambong, Sungai Sigandu, Sungai Sono, Sungai Boyo Alit, Sungai Seketing, Sungai Gabus, Sungai Sipatan. Akibatnya tingkat penutupan terumbu karang hanya 6 – 15,7% atau masuk kriteria "buruk sekali" dengan tingkat indeks keanekaragaman yang tergolong rendah. Kondisi terumbu yang buruk sekali mengakibatkan di perairan hanya dijumpai 5 spesies ikan karang dari 3 famili. Kelimpahan tertinggi adalah ikan karang *Neopomacentrus cyanomos* (Regal Demoiselle) serta ikan karang ekonomis yaitu beronang/ *Siganus javus*. Ikan-ikan ini merupakan ikan herbivor, yang biasanya hidup melimpah pada perairan dimana substrat dasarnya banyak tertutup oleh algae. Habitat estuari merupakan faktor yang sangat penting dan signifikan dalam menentukan kekayaan spesies ikan di daerah estuaria, dimana mampu digunakan untuk memprediksi variasi dan kepadatan ikan (Franca, 2012).



Gambar 1. Peta Zonasi Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro – Roban Batang

Kondisi mangrove sudah banyak mengalami degradasi yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia. Untuk mengembalikan ekosistem mangrove pada wilayah pesisir yang telah beralih fungsi menjadi kawasan budidaya

secara total adalah tidak memungkinkan. Dalam kasus demikian, perlu diciptakan kebutuhan masyarakat terhadap mangrove melalui pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait dengan mangrove serta optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan yang masih tersisa untuk penanaman mangrove (Mukaryanti, 2005)

Masyarakat kawasan KKLD/Taman Pesisir mayoritas adalah petani tanaman pangan dan jasa, sehingga jumlah nelayan sangat kecil kecuali di Desa Kedungsegog dan Sengon yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

Fungsi KKLD/Taman Pesisir sebagai tempat wisata rekreasi memiliki dua potensi wisata yaitu wisata alam pantai pasir Ujungnegoro dan wisata religi Makam Syekh Maulana Maghribi. Peran kiai atau penyebar agama Islam sangat dijunjung tinggi di masyarakat seperti uraian Abdurahman (2009) Perbedaan dalam status sosial, seringkali lebih rumit dan terkadang tumpang tindih. Namun dalam kehidupan sosial, sering ditandai dengan norma yang membedakan tua muda, kaya miskin, pimpinan bawahan, kiai santri. Dalam sistem norma ini, terutama di daerah perdesaan, para kiai memperoleh penghormatan yang lebih daripada pemimpin lokal lainnya. Jumlah pengunjung pantai pasir pada tahun 2011 mencapai 37.246 orang yang mampu memberikan retribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 62.588.400,-. Pengelolaan ekowisata diperlukan teknik pengelolaan, pengusahaan, penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dengan memperhatikan aspek konservasi. Dalam penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan ekowisata dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kegiatan konservasi dan masyarakat lokal sekitar wilayah ekowisata (Supyan, 2011)

Tata cara penetapan kawasan konservasi perairan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2009 dalam pasal 4 disebutkan bahwa kawasan konservasi perairan ditetapkan berdasarkan kriteria ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Secara ekologi kawasan konservasi perairan harus memiliki keanekaragaman hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan daerah pengasuhan. Kriteria sosial budaya meliputi dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman dan kearifan lokal serta adat istiadat, serta kriteria ekonomi meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika dan kemudahan akses mencapai kawasan.

Berdasarkan kriteria di atas, Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang telah sesuai berdasarkan komponen yang dimiliki dan dilindungi berupa kawasan Karang Kretek dan Karang Maeso, kawasan sosial budaya situs makam Syekh Maulana Maghribi, dan kawasan wisata pantai Ujungnegoro.

Otoritas pengelolaan KKLD/Taman Pesisir berada di bawah kewenangan Bupati Batang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang pada Bidang Kelautan, Seksi Konservasi dengan 2 (dua) orang staf. Luasnya wilayah pengelolaan dan besarnya tanggung jawab tidak sebanding dengan personel dan tidak adanya anggaran rutin khusus pengelolaan KKLD/Taman Pesisir.

Berdasarkan daftar isian score card evaluasi efektivitas yang diisi oleh pengelola sesuai dengan kondisi saat diperoleh skor penilaian sebagai berikut :

Tabel 1. Skor Penilaian Efektivitas Pengelolaan KKLD

No	Kriteria	Skor Ideal	Skor Penilaian	Persentase Penilaian
A	Latar Belakang (Context)	50	34	68,00 %
B	Perencanaan (Planning)	21	18	85,71 %
C	Kebutuhan (Inputs)	18	8	44,44 %
D	Pelaksanaan (Process)	26	13	50,00 %
E	Keluaran (Output)	41	26	63,41 %
F	Pencapaian (Outcome)	32	12	37,50 %
	Total A+B+C+D+E+F	188	111	59,04 %

Pada kriteria latar belakang, KKLD/Taman Pesisir telah memiliki dasar hukum yang jelas, dan didukung dengan peraturan yang ada, namun dalam penegakan hukum masih kurang. Kegiatan inventarisasi sumberdaya telah dilaksanakan sejak awal dan dilakukan secara rutin dan keseluruhan yang dapat dipergunakan untuk mendukung pengelolaan namun masih perlu peningkatan efektivitas pengelolaan informasi sumberdaya sehingga stakeholder lain juga mengetahui. Kesadaran dan kepedulian stakeholder lain terhadap ancaman dan kondisi sumberdaya laut masih dirasakan cukup rendah, mengingat batas / rambu kawasan yang kurang jelas dan kurangnya keterlibatan pada awal pembentukan kawasan.

Perencanaan merupakan kriteria dengan poin tertinggi sebesar 85,71% mengingat aspek ini disusun untuk mendekati kondisi ideal suatu kawasan konservasi. Dalam perencanaan selalu berupaya melibatkan masyarakat kawasan, pemangku kepentingan yang lain, dan dilakukan kajian untuk menyesuaikan kawasan konservasi dengan kondisi terkini. Rencana pengelolaan yang telah disusun dengan jangka waktu tertentu dan terus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan peraturan perundangan yang berlaku, serta hampir setiap tahun dilakukan kajian mengenai kondisi dan situasi kawasan konservasi. Hal ini dilakukan tidak semata-mata demi keberlangsungan kawasan namun juga adanya rencana atau kepentingan lain yang berlokasi dekat atau berbatasan dengan kawasan konservasi.

Otonomi membuat perencanaan pembangunan menjadi lebih bumi, karena para perencana kebijakan daerah lebih leluasa mengatur daerahnya sendiri. Mereka jugalah yang lebih mengetahui kondisi daerah, sehingga diharapkan

perencanaan pembangunan menjadi lebih baik, karena merupakan spesifikasi lokal, dan bukan generalisasi dari pusat. Fleksibilitas diharapkan dapat lebih tercapai, sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah (Hartuti, 2004)

Lokasi dan luas pemanfaatan lahan ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria peraturan perundangan yang berlaku berkaitan penetapan kawasan lindung, nilai ruang sesuai fungsi sistem kegiatan, jenis dan kebutuhan ruang, kemungkinan perkembangan dan usaha masa depan, ketersediaan lahan, kegiatan yang sudah ada dan persepsi/keinginan masyarakat setempat [Wibowo, 2001]

Kebutuhan KKLD/Taman Pesisir yang dinilai meliputi kegiatan penelitian, jumlah staf, sarana prasarana, dan anggaran. Penelitian yang ada tidak semua mampu menjawab kebutuhan pengelolaan dan tidak bisa langsung merespon ancaman kawasan konservasi. Jumlah staf masih sangat kurang untuk melakukan kegiatan pengelolaan yang penting (*critical management activities*) perlu dilakukan penambahan staf baik secara administratif maupun lapangan. Ketersediaan sarana prasarana dan anggaran masih dirasakan cukup memadai namun masih perlu peningkatan terutama tentang anggaran yang bersifat rutin operasional, pengawasan dan penegakan hukum di sekitar kawasan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan dilakukan sebagai upaya menilai tingkat keterlibatan pemangku kepentingan lain, masyarakat dan internal pengelola dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas fungsi kawasan. Keterlibatan pemangku kepentingan lain dan masyarakat lokal selama ini hanya terbatas pada proses memberikan masukan tanpa dapat ikut menentukan keputusan yang menyangkut pengelolaan. Peningkatan kapasitas internal lembaga pengelola juga masih perlu untukantisipasi dan menjawab ancaman terhadap keberlangsungan kawasan.

Keluaran yang dihasilkan merupakan hasil penilaian dari hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya dengan kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir. Beberapa hal yang mengalami kemajuan dari pelaksanaan pengelolaan KKLD/Taman Pesisir adalah meningkatnya status hukum yang semula SK Bupati diperkuat melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun demikian penetapan garis batas kawasan dan penegakan hukum di wilayah kawasan masih belum dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang mengalami peningkatan secara intensif adalah inventarisasi informasi biofisik, sosial budaya, ekonomi, sumberdaya perikanan dan kepedulian pemangku kepentingan serta kegiatan penelitian di lokasi sekitar kawasan mengingat kawasan KKLD/Taman Pesisir pada tiga tahun terakhir menjadi perbincangan hangat menyangkut rencana pembangunan PLTU dengan kapasitas 2 x 1.000 MW di kawasan konservasi. Keterbukaan informasi dan transparansi publik membutuhkan suatu sistem informasi yang bisa mendukung agar masyarakat bisa mengakses informasi publik secara maksimal. Selain sistem yang baik juga dibutuhkan sumberdaya manusia yang bisa mendukung untuk menjalani sistem yang baik dan aparatur yang memiliki pemahaman yang baik tentang partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik (Rahayu, 2010).

Kriteria pencapaian merupakan penilaian terhadap dampak pelaksanaan pengelolaan KKLD/Taman Pesisir seperti tujuan, ancaman, kondisi sumberdaya perikanan, kesejahteraan masyarakat, kesadaran, kepatuhan dan kepuasan pemangku kepentingan lainnya. Secara umum dampak pengelolaan tidak banyak memberikan perubahan ke arah yang lebih baik sedangkan ancaman dan tantangan yang dihadapi terus berkembang dan semakin kompleks. Konflik kepentingan semakin besar di kawasan konservasi, mulai dari peraturan perundangan, alih fungsi lahan, status kawasan, kelembagaan, peran serta masyarakat dan kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Melalui keterlibatan bersama antara pemerintah pusat, daerah dan pengelola lokal menyusun model pengelolaan perikanan sesuai kebutuhan masyarakat nelayan dan menjaga ekosistem laut. Dengan melibatkan masyarakat lokal ke dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan akan menghasilkan solusi yang lebih efektif. Nelayan dilibatkan dalam penyusunan rencana dan pengawasan terhadap peraturan yang telah disepakati (Safford, 2010)

Persepsi masyarakat terhadap keberadaan KKLD/Taman Pesisir cukup baik, meliputi penerimaan keberadaan kawasan, keuntungan yang diperoleh masyarakat, terpeliharanya kawasan dari kerusakan yang lebih parah, kepedulian meskipun masyarakat tidak mengetahui pasti batas-batas wilayah kawasan konservasi dan dasar peraturan pengelolaan kawasan. Masyarakat sekitar kawasan banyak yang menggantungkan hidupnya dengan mencari nafkah di sekitar kawasan baik sebagai nelayan maupun pelaku pariwisata. Kawasan konservasi dianggap mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dari sektor pariwisata dimana masyarakat menjual jasa sewa perahu dan warung/toko makanan dan minuman. Nelayan masih dapat memperoleh ikan dan udang di sekitar kawasan meskipun pada kenyataannya nelayan memperoleh hasil tangkapan dari perairan di atas 4 (empat) mil laut.

Kondisi biofisik KKLD/Taman Pesisir seperti terumbu karang dan bakau masih dianggap tidak berubah dari kondisi awal penetapan menjadi sorotan masyarakat atas lemahnya pengelolaan kawasan. Terumbu karang yang diyakini masyarakat sebagai tempat berkembang biak ikan masih tetap buruk kondisinya dengan didominasi perairan berlumpur. Masyarakat menilai ancaman keberadaan KKLD/Taman Pesisir lebih dikhawatirkan berasal dari lumpur dari sungai dan alih fungsi lahan seperti pertambangan bahan tambang non mineral yang berada di sekitar kawasan daripada limbah rumah tangga.

Aspek lingkungan fisik berkaitan erat dengan pola dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah permukimannya. Hal tersebut didasarkan pada teori bahwa manusia dengan lingkungan fisiknya, dalam hal ini lingkungan tempat tinggalnya, membentuk suatu lingkungan sosial budaya tertentu termasuk dalam perilaku terhadap sampah permukiman (Saribanon dkk, 2007)

Penegakan hukum juga masih dipandang lemah meskipun masyarakat telah memberikan masukan dan laporan mengenai pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi. Seperti disampaikan supyan dan Gamal (2011) dimana keberlanjutan sumberdaya perikanan bisa dicapai apabila masyarakat setempat, yang sebenarnya merupakan faktor

utama konservasi di tingkat daerah, memperoleh edukasi dan penghasilan alternatif. Penegakan hukum yang konsisten juga menjadi modal agar upaya konservasi kawasan perairan dapat berjalan lestari. Tiga akar permasalahan yang menyebabkan konservasi laut kurang berkembang yaitu ketidaktahuan masyarakat, kemiskinan absolut dan keserakahan serta arogansi kewenangan.

Menurut Budiati (2012), dua alasan kinerja lingkungan yang buruk, *pertama*, lemahnya komitmen instansi sektoral, kesadaran departemen lokal dan tantangan kapasitas di semua tingkatan meskipun terdapat investasi yang besar pada kebijakan lingkungan, sumberdaya alam dan pengembangan kepegawaian mengakibatkan lemahnya pelaksanaan peraturan dan prosedur di lapangan. *Kedua*, minimnya pertimbangan lingkungan pada tingkat perencanaan dan penyusunan program investasi publik dan rencana tata guna lahan dan sumberdaya daerah.

4. KESIMPULAN

Penilaian score card secara keseluruhan terhadap pengelolaan KKLD Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang diperoleh score sebesar 111 poin dari total poin ideal 188 poin atau sebesar 59,04%. Penilaian kriteria yang terbaik diperoleh dari segi perencanaan namun dari kriteria pencapaian diperoleh score yang paling rendah. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap keberlangsungan KKLD karena terbatasnya kemampuan daerah masih menjadi sumber permasalahan pengelolaan.

Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan KKLD Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang cukup bagus, baik yang memiliki latar belakang sebagai nelayan maupun pendukung kegiatan pariwisata yang berada di KKLD Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang. Manfaat kawasan konservasi laut diperoleh melalui indikasi semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perlunya peningkatan efektivitas pengelolaan KKLD/Taman Pesisir melalui perbaikan kelembagaan pengelola oleh UPTD dengan jumlah personel yang cukup, dan anggaran pengelolaan rutin yang memadai. Kegiatan pengelolaan yang lebih berorientasi peningkatan kapasitas dan kualitas biofisik KKLD/Taman Pesisir, peningkatan kepedulian melalui pemberdayaan masyarakat dan sistem penegakan hukum.

5. REFERENSI

- Abdurrahman. 2009. Fenomena Kiai Dalam Dinamika Politik: Antara Gerakan Moral dan Politik. Jurnal Karsa. 15(1). April 2009
- Budiati, Lilin. 2012. Good Governance dalam pengelolaan lingkungan hidup, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Charles, A., and Wilson, L. 2009. Human dimensions of Marine Protected Areas. – ICES Journal of Marine Science. Oxfordjournals. Canada.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2010. Info Kawasan Konservasi Perairan Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. 2012. Rencana Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro – Roban dan Sekitarnya, Batang.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. 2009. Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang, Batang.
- Franca, Susana. Vasconcelos, Rita P. Fonseca, Vanessa F. Tanner, Susanne E. Reis-Santos, Patrick, Costa, Maria Jose. Cabral, Henrique N. 2012. Predicting Fish Community Properties Within Estuaries: Influence of Habitat Type And Other Environmental Features. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 107. Lisboa. Portugal.
- Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Gaung Persada. Jakarta.
- Mardi wibowo. 2001. Aplikasi Sistem Informasi Geografi. Jurnal Teknologi Lingkungan, 2(2), Mei 2001.
- Mukaryanti. Saraswati, Adinda. 2005. Pengembangan Ekowisata Sebagai Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berkelanjutan. Kasus Desa Blendung Kabupaten Pemalang. Jurnal Teknologi Lingkungan. 6 (2).
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Osher, L.J. 2006. Heavy Metal Contamination from Historic Mining in Upland Soil and Estuarine Sediments of Egypt Bay, Maine, USA. Estuarine Coastal and Shelf Science. 70.
- Purnaweni, Hartuti. 2004. Implementasi Kebijakan Lingkungan Di Indonesia. “Dialogue” JIAKP. 1 (3), September 2004.
- Rahayu, Sri. 2010. Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora. 12 (2) Juli – Desember 2010.
- Robert C.M., Hawkins JP. 2000. Fully Protected Marine Reserver: A Guide, WWF in Washington DC USA. University of York. York. UK.
- Safford, Thomas. 2010. Linking Public Perceptions of Socioeconomic Change and Marine Resource Management in Rural Maine. The Coastal Society’s 22nd International Conference. Shifting Shorelines : Adapting to the Future.

- Saribanon N., E. Soetarto, S. Hadi Sutjahjo, E. Gumbira Sa'id, Sumardjo. 2007. Pendekatan Tipologi Dalam Pengembangan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Teknologi Lingkungan*. 8 (3). September 2007. Jakarta.
- Selig, Elizabeth R and Bruno, John F. 2010. A Global Analysis of the Effectiveness of Marine Protected Areas in Preventing Coral Loss, *Jurnal Plos One*, February 2010 Volume 5 Issue 2. www.plosone.org, diakses 12 April 2012.
- Sesetiono, Priti Swasti, Supono, I Wayan Eka Dharmawan. 2010. Penyusunan Panduan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Untuk Kawasan Konservasi Laut Di Indonesia. COREMAP II – LIPI, Jakarta.
- Staub, Francis and Hatziolos Maria E., 2004. Score Card to Assess Progress in Achieving Management Effectiveness Goals for Marine Protected Areas, The World Bank.
- Supyan. 2011. Pengembangan Daerah Konservasi Sebagai Tujuan Wisata. *Jurnal Mitra Bahari*, 5 (.2) Mei – Agustus 2011
- Supyan dan Gamal Samadan. 2011. Efektivitas dan Efisiensi Konservasi Laut Dalam Sustainability Sumberdaya Kelautan. *Jurnal Mitra Bahari*, 5(2), Mei – Agustus 2011
- Tashakkori, Abbas. Teddlie, Charles. 2010. *Mixed Methodology Mengkombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Yogyakarta. Yogyakarta.